Vol. V No. 2, Januari 2016

POPULIKA

JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

REVOLUSI MENTAL PEMUDA SEBAGAI *AGEN OF CHANGE* DAN PERUBAHAN SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA HEBAT
Joko Tri Nugraha, S.Sos, M.Si

PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA MELALUI PENERAPAN METODE EKSPOSITORI
T. Pramono

KAJIAN MODEL PENGELOLAAN DESA WISATA (Studi Kasus di Dusun Ketingan Desa Tirtoadi Kec. Mlati Kab. Sleman)
Suwarjo dan Jumadi

PENGUATAN LEMBAGA MASYARAKAT PESISIR PERSPEKTIF GENDER
Oktiva Anggraini dan Muhammad Agus

PENANGGULANGAN SAMPAH PERKOTAAN SECARA KOLABORATIF
Paharizal, S.Sos., MA

STRATEGI PR DALAM PENCINTRAAN DIRI SEORANG WAKIL RAKYAT
Hening Budi Prabawati

KONSTRUKSI REALITAS MELALUI SHARE INFORMASI DI FACEBOOK
Yuni Retnowati

MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
Syakdiah

ISSN : 0216-2490

DAFTAR ISI

Joko Tri Nugraha, S.Sos, M.Si	5 - 18	REVOLUSI MENTAL PEMUDA SEBAGAI *AGEN OF CHANGE* DAN PERUBAHAN SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA HEBAT
T. Pramono	19 - 24	PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA MELALUI PENERAPAN METODE EKSPOSITORI
Suwarjo dan Jumadi	25 - 46	KAJIAN MODEL PENGELOLAANDESA WISATA (StudiKasus di Dusun KetinganDesaTirtoadiKec. MlatiKab. Sleman)
Oktiva Anggraini dan Muhammad Agus	47 - 58	PENGUATAN LEMBAGA MASYARAKAT PESISIR PERSPEKTIF GENDER
Paharizal, S.Sos., MA	59 - 69	PENANGGULANGAN SAMPAH PERKOTAAN SECARA KOLABORATIF
Hening Budi Prabawati	70 - 78	STRATEGI PR DALAM PENCINTRAAN DIRI SEORANG WAKIL RAKYAT
Yuni Retnowati	79 - 93	KONSTRUKSI REALITAS MELALUI SHARE INFORMASI DI FACEBOOK
Syakdiah	94 - 103	MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

PENGUATAN LEMBAGA MASYARAKAT PESISIR PERSPEKTIF GENDER

Oktiva Anggraini
Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UWMY
e-mail: oktivabiyan@yahoo.co.id

Muhammad Agus
Fakultas Perikanan UNIKAL
e-Mail: agus.muhamad0@gmail.com

ABSTRACTS

Local institutions has contributions in developing a social economic system, achieving of a goal of the community and coordinating society in coastal areas. On the model of co-management in managing of resources the isles that are developed today is believed to overcome the problems of the environmental damage as well as poverty alleviation in the coastal communities in Indonesia. Even though, it still findings of gender disparities in value-for-labour income, access to and control over resources in coastal communities. The significant role fisherwomen play in fisheries and specifically aquaculture is overlooked. Women are therefore suffering from grēater poverty than men in virtually every community due to exclusion in most of the rural economic activities.This article elaborated the urgency of strengthening the capacity of local institutions on gender perspective. We focused specifically on identify opportunities to improve fisheries management through the engagement, empowerment of women in fisheries.

Key words: gender inequality, local institutions.

1. PENDAHULUAN

Dalam mencapai derajat perubahan sosial yang diinginkan di suatu kawasan, keberadaan lembaga lokal tidak dielakkan lagi kehandalannya dalam mengintroduksi masyarakat tentang teknologi, informasi yang baru hingga kebijakan maupun pola hidup yang mengikutinya. Lembaga lokal tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kebutuhan dan strategi perubahan setempat. Di berbagai kajian sosial di Indonesia, ditemukan fenomena bahwa introduksi lembaga baru yang berorientasi ekonomi seperti lembaga pasar dan pemasaran, koperasi, lembaga perkreditan dan lembaga lainnya harus mencari celah dan waktu yang tepat agar dapat diterima oleh masyarakat dan norma setempat. Introduksi inovasi (baik berupa teknologi maupun introduksi kelembagaan

baru) yang dilakukan tanpa mempertimbangkan fungsi kelembagaan lokal, norma dan budaya masyarakat serta kebiasaan fisik, seringkali mengalami kegagalan atau memerlukan waktu lama untuk diadopsi. Inovasi cangkul pada masyarakat etnis Dani di lembah Baliem misalnya, memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menggantikan budaya mengolah lahan dengan tugal. Contoh klasik lain adalah upaya introduksi pupuk pada awal intensifikasi padi awal tahun 1960-an yang memperoleh sambutan dingin dari petani dan kelembagaan lokal di Jawa.

Kelompok lokal masyarakat pesisir, sebagai bagian dari lembaga lokal merupakan salah satu komponen yang penting dalam pembangunan pesisir. Peran strategis anggotanya dapat ditemukan dalam kegiatan berbasis perikanan dan kelautan sebagai nelayan, pedagang pengecer, pengumpul ikan, pedagang besar, buruh upahan, maupun tenaga pengolah hasil perikanan. Sayangnya, dalam berbagai aspek kajian ataupun program-program pembangunan pesisir lembaga lokal jarang tersentuh oleh penyelenggara. Belum lagi bila dikaitkan dengan kesetaraan gender, dalam implementasi program-program penataan lingkungan atau kawasan, pemerintah belum menjamin tegaknya hak perempuan nelayan atas pengelolaan lingkungan. Artinya kontribusi perempuan nelayan sebagai bagian tidak terpisahkan dari perumusan dan pelaksanaan politik pengelolaan lingkungan yang berkeadilan, berkesetaraan, dan berkemanusiaan kurang diperhitungkan.

Kepedulian, tanggung jawab, komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir yang merupakan prinsip pengembangan pengelolaan sumber daya kelautan pada umumnya, tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif dari kelompok perempuan nelayan. Berangkat dari latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji urgensi penguatan lembaga lokal masyarakat pesisir berperspektif gender. Tulisan ini diawali dengan pembatasan konsep penguatan kelembagaan, faktor-faktor yang menghambat proses penguatan tersebut hingga benefit penguatan lembaga lokal masyarakat pesisir berperspektif gender.

2. LEMBAGA LOKAL DAN PENGUATANNYA

Lembaga merupakan konsep yang berpadu dengan struktur, artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya (Roucek dan Warren, 1984). Istilah "kelembagaan" dan "organisasi" menimbulkan banyak penafsiran yang menimbulkan saling-silang pendapat. *Institution* dan *organization* sangat sulit dibedakan namun ada kesadaran para ilmuwan untuk menjelaskan masing-masing istilah. Menurut Syahyuti (2003) ada empat cara dalam membedakan: pertama, kelembagaan cenderung tradisional sedangkan organisasi cenderung modern; kedua, kelembagaan dari masyarakat itu sendiri dan organisasi datang dari atas; keti-

ISSN : 0216-2490

ga, kelembagaan dan organisasi berada dalam satu kontinum, dimana organisasi adalah kelembagaan yang belum melembaga; keempat, organisasi merupakan bagian dari kelembagaan.

Suatu lembaga atau organisasi lokal mampu bertahan dalam dinamika masyarakat bila tetap memiliki fungsi yang dibutuhkan. Eksistensinya ditentukan oleh kemampuannya dalam melayani tuntutan sosial masyarakat setempat dalam kurun waktu yang sangat beragam.Sebagai lembaga lokal, fungsinya antara lain: (a) mengorganisir dan memobilisasi sumberdaya; (b) membimbing stakeholder pembangunan dalam membuka akses ke sumberdaya produksi; (c) membantu meningkatkan *sustainability* pemanfaatan sumberdaya alam; (d) menyiapkan infrastruktur sosial di tingkat lokal; (e) mempengaruhi lembaga-lembaga politis; (f) membantu menjalin hubungan antara petani, penyuluh dan peneliti lapang; (g) meningkatkan akses ke sumber informasi; (h) meningkatkan kohesi sosial; (i) membantu mengembangkan sikap dan tindakan kooperatif, dll.

Penguatan lembaga yang dimaksud adalah sebagai proses dimana individu, kelompok, organisasi, kelembagaan dan masyarakat mengembangkan kemampuannya baik secara individual maupun kolektif untuk melaksanakan fungsi mereka, menyelesaikan masalah mereka, mencapai tujuan-tujuan mereka secara mandiri (Goran dan Isaksen, 2002:14).

Sejalan dengan konsep tersebut, Grindle (1997) berpendapat bahwa penguatan kelembagaan sebagai *"ability to perform appropriate task effectively, efficiently and sustainable"*. Pengembangan kapasitas ini mengacu kepada *"improvement in the ability of public sector organizations"*. Dalam mencapainya bukan terletak pada instrumen yang digunakan akan tetapi lebih mengacu kepada kemampuan individu secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuan memecahkan masalah (Widodo, 2002).

Penguatan kelembagaan dapat diraih secara bertahap mulai dari peningkatan kemampuan; merumuskan strategi-strategi untuk menyelesaikan masalah, meraih kesempatan yang relevan; memanfaatkan secara efektif sumber-sumber dasar yang mendukung pelaksanaannya (Morisson, 2002:42), memantau dan mengevaluasi rencana program serta menggunakan *feed back* (Millen, 2001:142). Di samping dibutuhkan ruang dialog, penguatan kelembagaan menuntut adanya jaminan terhadap usulan-usulan masyarakat menjadi agenda program pembangunan (Nico, 2002: 122).

3. PENGUATAN KELEMBAGAAN LOKAL DI BERBAGAI DAERAH

Di tengah fenomena maraknya lembaga-lembaga formal di berbagai pedesaan, yang acapkali meminggirkan peran kelembagaan lokal, sejumlah kajian menunjukkan lembaga lokal masih potensial untuk dikembangkan dalam pembangunan wilayah. Kelem-

bagaan suku contohnya, masih berperan dalam kehidupan masyarakat Mentawai, terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan pada berbagai tingkatan; pada tingkat kelompok suku; tingkat komunitas dan kerjasama kelompok dengan organisasi supra desa. Dalam konteks pengembangan pariwisata budaya, peran pemimpin suku dalam "upacara selingkar hidup" sangat penting dan kedudukan Uma (rumah adat yang dijadikan tempat tinggal bersama seluruh anggota suku) masih menjadi pusat orientasi sosial ekonomi warga (Erwin, 2007). Penelitian Erwin (2015) juga menunjukkan bahwa masyarakat Mentawai memiliki modal/energi sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan, yang didasarkan pada (i) Tanah sebagai aset komunal yang belum digunakan dapat dikelola untuk usaha produktif. Pada masyarakat pesisir, solidaritas sosial dan reprositas yang kuat ditemukan di tingkat keluarga dan masyarakat, dalam memenuhi kebutuhan modal dan fasilitas berwirausaha pada kelompok perempuan nelayan di wilayah pesisir Bantul. Sementara, kemampuan berjejaring kelompok nelayan lokal (bukan nelayan *ngandong*) dengan berbagai pihak perguruan tinggi, swasta mampu melestarikan penyu langka di kawasan Samas, Bantul (Anggraini, 2015).

Fenomena lain di pesisir Banyuwangi, kelompok nelayan Samodra Bakti telah mengintrodusir pelestarian hiu langka dan membangun Rumah Apung yang dapat menggiring wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut. Sederet fenomena di atas, selaras dengan pendapat Morrison (2002), ketika ruang yang cukup diberikan pada lembaga lokal untuk berkembang, difasilitasi oleh sejumlah pihak penyelenggara pemberdayaan, penguatan kelembagaan lokal akan optimal.

4. HAMBATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN LOKAL

Dalam perspektif pembangunan yang berbasis pada kemampuan lokal, keberhasilan pembangunan diukur dari kemampuan masyarakat mendayagunakan sumber-sumber lokal yang mereka miliki, terdiri dari: Modal manusia *(human resources)*; modal alam *(natural resources)*; modal finansial *(financial resources)*; modal fisik *(physichal resources)*; modal sosial *(social capital resources)* (Surahman, 2010). Penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan memanfaatkan keunggulan lokal tersebut adalah salah satu solusi yang dapat diberikan dalam penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi untuk mewujudkannya, ada berbagai macam kendala yang selama ini dihadapi oleh masyarakat pedesaan dan pesisir dalam melaksanakan pembangunan:

a. Keterbatasan kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia.
b. Keterisolasian dan keterbatasan sarana dan prasarana fisik.
c. Lemahnya kemampuan kelembagaan terhadap peluang-peluang bisnis yang ada, jasa dan perdagangan.

ISSN : 0216-2490

d. Terbatasnya akses masyarakat kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi yang antara lain meliputi: akses permodalan, akses teknologi produksi, akses manajemen usaha, pengetahuan dan ketrampilan SDM, akses informasi pasar dan keberlanjutan usaha-usaha produksi (Surahman, 2010).

Sementara di sisi lain, terdapat arah baru yang diharapkan dari lembaga lokal yakni efektifitas dan optimalisasi dalam pengelolaan pembangunan desa dengan visi pemberdayaan. Urgensi keberadaannya diharapkan menjadi wadah sekaligus agen penggerak dalam memfasilitasi, memediasi, mengkomunikasikan sekaligus sebagai aktor dalam mengembangkan partisipasi, mendayagunakan keswadayaan gotong royong demi mewujudkan kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Optimalisasi pengembangan inisiatif lokal dalam rangka peningkatan pendapatan, keswadayaan dan kesejahteraan, akan mudah dicapai apabila dikembangkan kerja sama kewilayahan antar lembaga kemasyarakatan lokal sebagai agensi pembangunan. Hal ini penting karena: pertama, adanya kendala maupun potensi SDM, SDA dan karakteristik kondisi wilayah yang tidak sama. Kerjasama antara lembaga lokal akan menumbuhkan pendekatan pembangunan yang sinergis. Kedua, sebagai forum koordinasi perencanaan pembangunan kewilayahan agar berjalan tanpa menimbulkan akses yang merugikan bagi masyarakat maupun daerah lain.

5. PENGUATAN LEMBAGA LOKAL DI WILAYAH PESISIR

Pada tahun 1980-an, pendekatan *welfare-oriented development* atau *equity – oriented development* digugat. Lahir kemudian, paradigma *people–centred development* yang kemudian melandasi wawasan *Community–Based Resource Mangement (CBRM)*. Tjokrowinoto (1996) menterjemahkan *CBRM* menjadi Pengelolaan Sumber Daya Lokal (PSDL). Menurut Nikijuluw (2002) *Co-Management* adalah pembagian atau pendistribusian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya perikanan. Tujuannya tak lain adalah pengelolaan perikanan yang lebih tepat, lebih efisien serta lebih adil dan merata dengan (1) mewujudkan pembangunan berbasis masyarakat (2) mewujudkan proses pengambilan keputusan secara desentralisasi sehingga dapat memberikan hasil yang lebih efektif dan (3) mekanisme untuk mencapai visi dan tujuan nelayan lokal serta mengurangi konflik antar nelayan melalui proses demokrasi partisipatif (Harahap, 2015). Nampak jelas dalam hal ini, tujuan mulia dari *co-management* tak lain adalah peningkatan kapasitas masyarakat, termasuk kelembagaan lokal.

Dalam konteks pemberdayaan, beberapa prioritas terpenting yang bisa dilaksanakan oleh lembaga lokal di wilayah pesisir antara lain (i) Pengembangan usaha ekonomi produktif, (ii) Pemenuhan kebutuhan dasar terutama di bidang pendidikan kualitas SDM

yang produktif dan berdaya saing, kebutuhan gizi, maupun sarana dan prasarana fisik sesuai kebutuhan, (iii) Pelestarian pranata dan kearifan lokal, (iv) Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pengambilan keputusan pembangunan (Surahman, 2010).

Kerapuhan usaha ekonomi masyarakat nelayan selama ini, dari faktor internal nelayan disebabkan rendahnya pendidikan dan ketrampilan; belum adanya kolaborasi efektif dari berbagai usaha ekonomi yang ada agar efisien, efektif dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bersama. Dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar ini dapat dikembangkan institusi–institusi lokal semacam lumbung pedesaan, koperasi primer yang telah ada, yayasan sosial, yayasan pendidikan maupun usaha untuk mengembangkan lembaga keuangan pedesaan.

Seringkali pengembangan ekonomi juga harus diikuti dengan pengembangan kelestarian dan kearifan lokal yang berorientasi sosial-kultural. Sedangkan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan pembangunan lebih pada fungsi dan peran yang optimal untuk lebih meningkatkan kontribusi dan perannya dalam pengelolaan pembangunan. Pengelolaan pembangunan partisipatif memberikan peluang besar bagi masyarakat termasuk kelembagaan lokal dalam pengambilan keputusan dan mendayagunakan keswadayaan guna mengembangkan potensi dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan mutu kehidupan masyarakat yang lebih baik secara transformatif.

Kelembagaan lokal sebagai potensi kearifan lokal, keberadaanya seringkali erat kaitannya dengan kebiasaan, budaya dan perilaku sosial. Ekspresi kebiasaan dan perilaku sosial tersebut hidup dan tumbuh serta melekat dalam kehidupan sehari-hari. Jika kebiasaan dan perilaku sosial tersebut dipandang bermanfaat dan menjadi strategi bertahan suatu kominitas maka akan menjelma menjadi sebuah kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki standar budaya yang tertanam dan diakui eksistensinya sebagai modal sosial. Hal ini dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperlancar proses pembangunan (Setyawati, 2014).

Bagaimana peran negara? Dalam hal ini, pemerintah dapat bersama-sama masyarakat mengakui praktik-praktik pengelolaan sumberdaya perikanan yang selama ini dilakukan masyarakat secara turun temurun dan merupakan adat atau budaya dianut selama ini. Langkah kedua, pemerintah dan masyarakat menghidupkan kembali atau merevitalisasi adat dan budaya masyarakat dalam mengelola sumberdaya perikanan. Adat dan budaya tersebut barangkali telah hilang atau tidak digunakan lagi karena berubahnya zaman dan waktu. Meski demikian, masyarakat dan pemerintah menyadari bahwa adat dan budaya itu perlu dihidupkan lagi karena ternyata hilangnya adat dan budaya tersebut tidak membuat masyarakat makin sejahtera dan bahagia. Ketiga, pemerintah mem-

ISSN : 0216-2490

berikan tanggung jawab sepenuhnya dan wewenang pengelolaan sumberdaya kepada masyarakat (Fauzi, 2005).

Untuk mencapai sasaran kolaborasi secara tepat, Alikodra (2006) menyarankan perlu keterlibatan lembaga lokal dalam menunjang proses pembangunan berkelanjutan, akuntabel dan transparan, pelestarian lingkungan, pengembangan mata pencaharian, keadilan dan keterpaduan. Sederet tahap ini semakin terbuka saat ini seiring dengan diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberi kewenangan bagi desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa secara otonom termasuk memberi ruang buat desa dalam menetapkan aturan adat sebagai aturan hukum.

5. URGENSI PENGUATAN KELEMBAGAAN LOKAL BERBASIS GENDER

Dengan berjalannya waktu, industrialisasi di sektor kelautan dan perikanan yang masif, kurang mempertimbangkan potensi lokal, pada akhirnya pendekatan *Co-management* tidaklah cukup adil dari sisi pengarasutamaan gender dalam pengelolaan potensi pesisir. Potensi Perikanan Indonesia di mata dunia, tercatat data FAO 2012, produksi perikanan tangkap nomor 3 dengan jumlah 57.077.000 ton, perikanan budi daya (di luar rumput laut) mencapai 2.718.000 ton atau nomer 4 di dunia. Namun angka tersebut berbanding terbalik dengan kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia yang sebagian besar masih miskin. Data Kementrian dan Kelautan Perikanan terakhir (2012), Unit Pengolahan Ikan (UPI) didominasi oleh UPI skala Mikro (95%) dan persebarannya terkonsentrasi di provinsi Jawa Timur. UPI ini lebih banyak digerakkan oleh perempuan nelayan, dengan jenis pengolahan dominan yakni: penggaraman, pemindangan dan pengasapan.

Sementara kemiskinan bila dikaitkan dengan perempuan akan tampak sebagai beban yang lebih berat ketimbang laki-laki dan memiliki dimensi yang lebih luas. Kemiskinan dari sudut pandang perempuan, khususnya istri nelayan, bukan hanya sekedar kecukupan ekonomi semata tetapi juga bisa penderitaan psikis ataupun fisik. Dibandingkan dengan para nelayan, kondisi istri nelayan dalam kemiskinan jauh lebih tidak diperhitungkan. Hal ini dilihat dari curahan tenaga untuk bekerja, rendahnya waktu santai, bahkan nyaris dari akses kesempatan, manfaat mengembangkan diri dan ketenangan batin.

Sungguhpun perempuan nelayan memiliki andil yang cukup besar di sektor perikanan dan kelautan, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan menjadi rantai bernilai bagi nelayan dan perempuan nelayan untuk berkiprah bersama, tidaklah mudah. Kurangnya kesempatan akses sumberdaya pesisir menjadi variabel penting yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Kurangnya akses dan kontrol perempuan terhadap sumberdaya sangat berpengaruh terhadap kemiskinan perempuan, perempuan paling menderita ketika masyarakat mengalami

kelangkaan sumberdaya (Jacobson, 1989). Gambaran yang sama juga ditemukan di banyak negara-negara terutama di benua Asia Afrika, keterlibatan perempuan nelayan terkadang kurang diperhitungkan, baik dari sisi akses, perencanaan, kesempatan, kontrol dan pemanfaatan sumber daya (Samuel, 2013). Data FAO 2012, menunjukkan hanya sedikit negara yang telah menerapkan kesetaraan gender seperti Estonia, rasio gender pekerja di sektor perikanan 1:1, di Israel 95% perempuan nelayan berpendidikan diploma sedang di Jamaika, perempuan nelayan mendominasi sektor perikanan.

Masalah kesetaraan gender di bidang perikanan dan kelautan menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan kepemilikan aset dan mekanisasi industri perikanan. Kenaikan 600% dalam produksi industri ikan salmon sejak tahun 1990 di Norwegia justru menurunkan peran perempuan dalam industri salmon dari 20 % pada 1990 menjadi hanya 9% pada tahun 2010. Hal ini terutama disebabkan oleh konsentrasi kepemilikan aset pertanian yang didominasi sistem patriarkhi, dibarengi oleh sentralisasi dan mekanisasi industri dan rusaknya kepemilikan masyarakat lokal. Di India, negara bagian Kerala, mekanisasi perikanan sejak tahun 1960 telah meminggirkan pengolah ikan dan pedagang perempuan dalam pengolahan pasca panen (Gopal, 2013).

Dengan demikian program kesetaraan gender di sektor kelautan dan perikanan bukan hanya masalah nasional namun menjadi masalah global yang tertuang dalam *Millenium Development Goal's* yang dilanjutkan dengan *Sustainability Development Goal's (United Nations, 2011)*. Tinjauan dari peran negara, untuk memberikan muatan substansi prinsip pengarusutamaan gender dalam misi dan arah kebijakan serta strategi pembangunan kelautan dan perikanan, sebenarnya sudah ada. KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) bekerjasama dengan KPPA (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak) melalui Kesepakatan bersama No. 06 MEN-KP/KB/III/2011 dan 12 Tahun 2011 tentang peningkatan efektivitas PUG (Pengarasutamaan Gender) Bidang Kelautan dan Perikanan, selanjutnya Kesepakatan bersama antara Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi KPPPA dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 06/MENPP-PA/Dep. I/04/2012 dan No. 02/DJPT-KKP/PKS/IV/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Fasilitasi Bimbingan Diversifikasi Usaha Penangkapan Ikan bagi Wanita Nelayan. Problemnya adalah, masih banyak terdapat kecenderungan lemahnya sistem pendukung usaha perikanan dan kelautan dalam hal penciptaan akses dan kesempatan untuk penguasaan sumber daya. Sederet kajian penelitian menunjukkan lemahnya dukungan lingkungan kebijakan pemerintah (*policy environment)* dan belum optimalnya dukungan sektor swasta dalam pemberdayaan potensi kelembagaan dan organisasi sosial tradisi dalam pengembangan perikanan dan kelautan akhirnya bermuara pada rendahnya akses bagi komunitas perikanan dan ke-

ISSN : 0216-2490

lautan dalam menguasai sumber daya (Gunalan, 2014; Sahudiyono, 2009; Sakaria, 2014; Partosuwirdjo, 2010; Anggraini, 2015) .

Berangkat dari persoalan tersebut, penerapan model *Co-Management* dengan teknik pemberian informasi, pendampingan (advokasi), kooperatif, konsultatif dan instruktif perlu melibatkan mempertimbangkan kesetaraan gender. Langkah sederhana yang dapat ditempuh adalah advokasi *stakeholder* agar sensitif gender dalam pengembangan potensi kelautan daerahnya. Hal ini tidaklah mudah karena masih banyak ditemukan perbedaan kepentingan *stakeholder*, rendahnya sensitifitas gender pembuat kebijakan akibat budaya patriakhi dan rendahnya pengetahuan.Tidak sedikit pemimpin daerah yang *gagap* dengan istilah PUG (pengarasutamaan gender), diterjemahkan sebagai pemberdayaan perempuan saja sehingga warna program pemberdayaan perempuan nelayan masih berkutat pada pelatihan kuliner dan sejenisnya. Belum terpikir oleh mereka misalnya upaya pengembangan fasilitas bekerja bagi perempuan nelayan dan nelayan (tempat penitipan anak, sekolah informal), akses berorganisasi yang sama antar nelayan dan perempuan nelayan, santunan sosial yang adil bagi nelayan dan perempuan nelayan. Alih-alih memberdayakan perempuan nelayan, tidak sedikit program pemberdayaan yang justru berujung pada penambahan beban pada perempuan nelayan (*triple bourden).*

Dari sisi penguatan kelembagaan, dapat ditempuh dengan penguatan hubungan kemitraan antara nelayan dan perempuan nelayan dengan stakeholders lain, yaitu pengembangan kelembagaan atau forum yang dapat memfasilitasi interaksi kemitraan secara aktif, penyesuaian mekanisme teknis dan bentuk kemitraan yang cocok dengan karakteristik nelayan dan perempuan nelayan serta pelaksanaan hubungan kemitraan secara periodik dan berkelanjutan. Mengingat kompleksnya permasalahan pengembangan desa pantai maka kontribusi KPP di dalam pengembangan ekonomi wilayah tersebut dapat dilakukan melalui program pendampingan kelompok yang selama ini telah dibina oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Dalam pendampingan ini, pemerintah dapat melibatkan perguruan tinggi serta swasta untuk mendukung pengembangan keterkaitan desa-kota dengan jejaringan produksi dan distribusi yang saling menguntungkan; pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Manfaat yang dapat diraih dengan penguatan kelembagaan lokal masyarakat pesisir berbasis gender ini cukup banyak, yakni: dari sisi pemerintah, dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender yang ditujukan bagi masyarakat pesisir baik perempuan nelayan dan nelayan; kebijakan dan pelayanan publik serta program

dan perundang-undangan yang ada, adil dan responsif gender sehingga dapat membuahkan manfaat baik bagi perempuan nelayan dan nelayan; dapat diidentifikasi bagaimana akses, kontrol serta manfaat dari nelayan dan perempuan nelayan dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan. Dari sisi masyarakat pesisir, jelas akan menjamin tegaknya hak-hak masing-masing dan penghargaan yang sama antara perempuan nelayan dan nelayan.

PENUTUP

Secara konseptual model *co-management* dalam pengelolaan sumber daya pesisir yang dikembangkan dewasa ini diyakini bisa menanggulangi permasalahan kerusakan lingkungan sekaligus pengentasan kemiskinan pada masyarakat pesisir di Indonesia. Namun karena masih ditemukannya ketimpangan gender yang tajam di berbagai program pemberdayaan sehingga dalam penguatan kapasitas kelembagaan lokal, perlu dipertimbangkan keadilan gender sehingga tercapai penegakan hak perempuan nelayan dan nelayan, kesetaraan gender dari sisi akses, kontrol, pengambilan keputusan maupun manfaat dari pengelolaan potensi pesisir. Keberhasilan pelaksanaan pengarasutamaan gender di bidang kelautan dan perikanan juga akan memperkuat kehidupan sosial politik dan ekonomi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA :

Alikodra, Hadi S., 2006, Integrasi Konsep Pengelolaan SDAL Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, *Makalah*, Disampaikan Pada Diklat Perencanaan Daerah, Badan Diklat DEPDAG-RI, Jakarta.

Anggraini, Oktiva, Muhammad Agus, 2015, Integrasi Gender dalam Penguatan Modal Sosial Berbasis Kelembagaan Lokal Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bantul, Laporan Hibah Bersaing, Yogyakarta: UWMY.

Erwin, 2007, Pembangunan Sosial pada Masyarakat Mentawai di Pulau Siberut dalam Nursyirwan Effendi dan Lucky Zamzami, *Antropologi dan Pembangunan di Masyarakat Lokal*, Padang: Penerbit Laboratorium Antropologi Fisip Unand.

————, 2015, Model Pemberdayaan Mayarakat Mentawai melalui Penguatan Kelembagaan Lokal di Pulau Siberut, *Jurnal SOSIO KONSEPSIA Vol. 04, No. 02, Januari - April, Tahun 2015.*

Fauzi, A., 2005, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Grindle, M.S., (editor), 1997, *Getting Good Government : Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*, Boston, MA: Harvard Institue for International Development.

Gopal, Nikita, 2013, Gender and Change in The Spotlight, *Report*

ISSN : 0216-2490

on the 4th Global Symposium on Gender in Aquaculture and Fisheries, Yeosu-Korea, 1-3 May.

Goran Anderson and Jan Isaksen, 2002, *Best Practice in Capacity Building in Public Finance Management in Afrika*, Swedia, International Swedish Institut for Public Administration and Michelen Institut Development Studies and Human Right.

Gunalan, 2014, Pengembangan Wilayah Pesisir Melalui Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo Utara, *Disertasi*, Yogyakarta: UGM.

Harahap, Hamdani, Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan, *Makalah* pada Workshop Membangun Sinergitas Ekonomi, Lingkungan, Hukum, Budaya dan Keamanan Untuk Menegakkan Negara Maritim yang Bermartabat Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan diselenggarakan Forum Rektor Indonesia dan USU pada tanggal 5-6 Maret 2015.

Jacobsen Joyce P, 1998, *The Economics of Gender*, Hongkong: Great Britain, TJ International, Padstow, Corwall.

Milen, Anni, 2001, *What Do We Know About Capacity Building ?, An Overview of Existing Knowledge and Good Practice*, Geneva: World Health Organization (Department of Health Service Provision).

Morrison, Terrence, 2001, *Actionable Learning–A Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning*, ADB Institute.

Nico, Kanan (edit.), 2002, *Politik Pemberdayaan Dinamika Politik di Indonesia*, Jakarta: The Ford Fondaution, Pustaka Percik Ilham Cendikia.

Nikijuluw, Victor P.H., 2002, *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*, Jakart: P3R.

Partosuwirjo, Mulyono, 2010, Kajian Interaksi Lingkungan Usaha Perikanan untuk Menyusun Model Pemberdayaan Usaha Perikanan Tangkap di DIY, *Disertasi* Bogor, IPB.

Roucek, Joseph S. dan Roland L. Warren (terj.)., 1984, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Bina Aksara.

Sahudiyono, 2009, Pemberdayaan Ekonomi Mayarakat Pesisir (PEMP) di Wilayah Pesisir Kabupaten Bantul, *Tesis*, UGM.

Sakaria, 2014, Kapital Sosial, Negara dan Pasar : Studi pada Komunitas Pulau-pulau Kecil (Kasus Komunitas Nelayan di Pulau Barrang Lompo Kota Makassar-Provinsi Sulawesi Selatan), *Disertasi*, Bogor: IPB.

Samuel Kiumbuku Forms of Gender Inequalities in Fish Farming in Kwanza Division,Trans Nzoia County, Kenya, Research on Humanities and Social Sciences ISSN 2222-1719 (Paper) Vol.3,

No.15, 2013 ISSN 2222-2863 (Online), The International Institute for Science, Technology and Education (IISTE) (www.iiste.org akses, 4 November 2015).

Setyawati, Yuningtyas, 2014, Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pesisir Berdasarkan Kearifan Lokal (Studi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kawasan Pantai Kuwaru dan Pandansimo, Bantul untuk Mendukung Pengembangan Sektor Pariwisata, *Laporan Penelitian (unpublish)*, UAJY.

Surahman, Fajar, 2010, Model Penguatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Memperkuat Kemandirian Desa, *Jurnal Publika*, Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, tahun 1 Nomor 1 Januari 2010, Universitas Madura.

Syahyuti, 2003, *Bedah Konsep Kelembagaan: Strategi Pengembangan dan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian*, Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian.

Tjokrowinoto, Moeljarto, 1999, *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Widodo, Tri, W.U., 2004, *Decentralization and Capacity Building in Indonesia Local Administration: Case study of Bandung City Government*, Department International Cooperative Graduate School of International Development, Nagoya University.

Jurnal Berkala:

FAO, 2012, *Selected Issues in Fisheries and Aquaculture*, National Aquaculture Sector Overview, NASO Facts Sheet.

United Nations, (2011). *Objective and Themes of the United Nations Conference on Sustainable Development*, New York: Report of the Secretary-General, UNCSD.

ISSN : 0216-2490